

SKRIPSI

**PERAN DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN, DAN
OLAHRAGA ACEH JAYA DALAM PENGELOLAAN SEKTOR PARIWISATA**



Diajukan Oleh:

YUSRIJAL
NIM. 160802059

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yusrijal
NIM : 160802059
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat dan Tanggal Lahir : Lamno, 08 Oktober 1998
Alamat : Jln. Lingkar kampus UIN Ar-Raniry,
Lorong pelangi, Rukoh Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Juli 2023

Yang Menyatakan



Yusrijal

NIM. 160802059

**PERAN DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN,
DAN OLAHRAGA ACEH JAYA DALAM PENGELOLAAN SEKTOR
PARIWISATA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

YUSRIJAL

NIM. 160802059

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyah oleh:

Pembimbing I,



Dr. Fauzi, M.Si.
NIP. 196805111994021001

Pembimbing II,



Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012

**PERAN DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN,
DAN OLAHRAGA ACEH JAYA DALAM PENGELOLAAN SEKTOR
PARIWISATA**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Juli 2023 M
2 Muharram 1445 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Fauzi Ismail, M.Si.
NIP. 196805111994021001

Sekretaris,



Muazzinah, M.P.A.
NIP. 198411252019032012

Penguji I,

Aklima, S.Fil.L., M.A.
NIP. 198810062019032009

Penguji II,



Mardani Malemi, S.Fil.L., M.A.P.
NIP. 198105052011011004

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Pariwisata merupakan sektor yang bisa menunjang kemajuan suatu daerah, terutama dengan adanya peraturan mengenai otonomi daerah. Kegiatan ini diberlakukan salah satunya atas dasar karena masyarakat daerah memiliki modal yang dapat di andalkan untuk kemajuan daerahnya, salah satunya adalah melalui kegiatan pariwisata. Pengelolaan objek wisata di Kabupaten Aceh Jaya sangat penting untuk dilakukan agar objek wisata tersebut dapat menjadi pusat daya tarik sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk peran pemerintah dan konsep pengelolaan sektor pariwisata di kabupaten Aceh Jaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi untuk menggambarkan secara umum tentang masalah-masalah yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan indikator pengelolaan menurut George R. Terry menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi, yaitu: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*). Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa Peran pemerintah dalam pengelolaan pariwisata di Aceh Jaya dengan membantu menumbuhkan usaha-usaha ekonomi yang saling merangkai kegiatan perekonomian sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Aceh Jaya. Konsep pengelolaan yang dilakukan dengan perencanaan yang dilakukan oleh Disparekrafpora Aceh Jaya lebih pada menetapkan 10 destinasi wisata. Pengorganisasian dengan melakukan pembinaan kepada pihak-pihak pengelola wisata. Penggerakan pengelolaan wisata, yaitu mengupayakan adanya dukungan partisipasi dari semua pihak yang terlibat memberikan motivasi, dan mengembangkan potensi secara optimal dan hal penghambat dalam mencapai tujuannya. Melakukan pengawasan kepada kelompok masyarakat agar dapat mengetahui update selanjutnya

Kata Kunci: *Peran; Pengelolaan; Pariwisata.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peran Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan, Dan Olahraga Aceh Jaya Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata”. Selanjutnya selawat beserta salam kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad saw yang telah menuntun umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi beban studi yang diperlukan untuk mencapai gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Administrasi Negara, skripsi ini selesai berkat adanya dukungan dan dorongan dari orang tua, sahabat-sahabat dan dosen pembimbing.

Dalam kesempatan ini penulis menghanturkan ucapan terima kasih atas bantuan, inspirasi dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Adapun ucapan terima kasih penulis adalah kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta stafnya yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Muazzinah, B.Sc, MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan sekaligus pembimbing kedua yang telah

meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta seluruh staf dan dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak membantu dalam penulisan ini.

4. Orang tua tercinta: ayahanda Abdullah dan ibunda Yuliana, yang selalu memberikan kasih sayang, mendidik, membimbing, memberikan motivasi serta tak pernah henti mendoakan penulis untuk selalu mendapatkan yang terbaik.
5. Dr. Fauzi, M.Si. selaku pembimbing pertama, yang telah memberikan arahan kepada penulis dengan penuh perhatian dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberi arahan dan masukan dalam penulisan ini.
7. Juanda, S.Pd.I., M.Pd. selaku Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya dan Beserta Staff nya yang sudah membantu saya dalam melaksanakan penelitian.
8. Masyarakat dan Pelaku Usaha Wisata di Kabupaten Aceh Jaya
9. Terima kasih kepada teman-teman sejawat leting 2016 serta seluruh mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan saran-saran dan bantuan moril yang sangat membantu penulisan skripsi ini.

Hanya Allah swt yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih atas segalanya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. Penulis telah berusaha semaksimal

mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun kesempurnaan bukanlah milik manusia, apabila dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Kepada Allah lah kita meminta petunjuk dan ampunan dari Nya. *Aamin ya rabbal' alamin.*

Darussalam, 02 Mei 2023

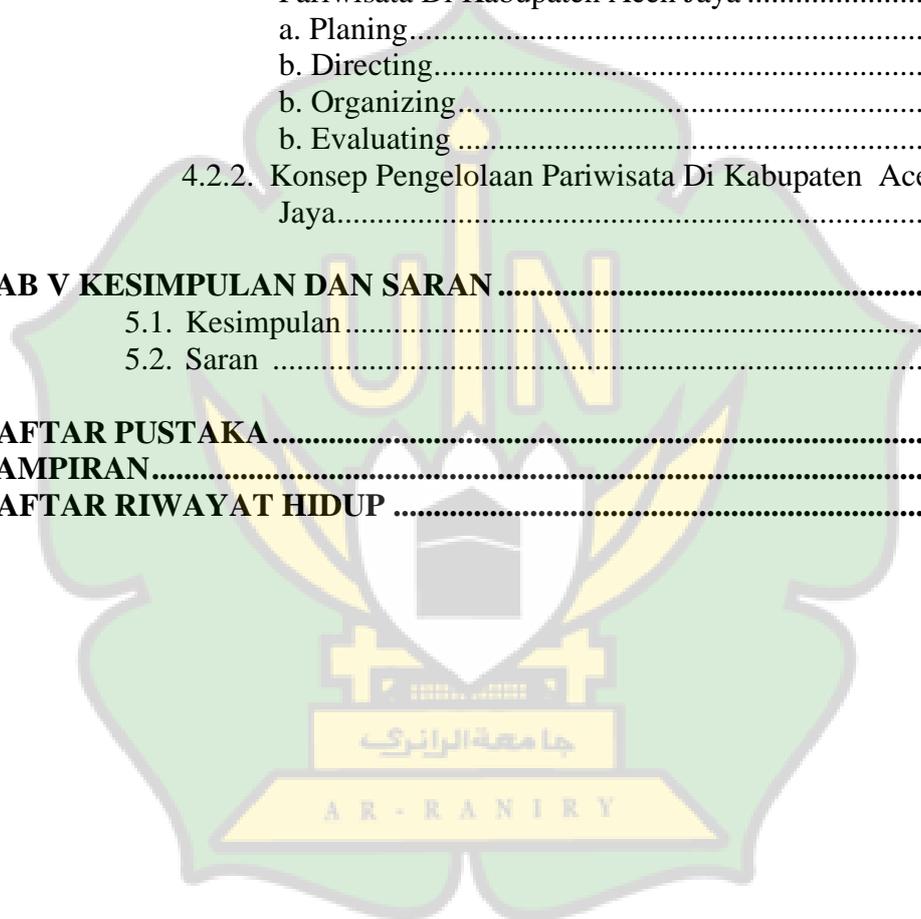
Yusrijal



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PENGUJI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Peran Pemerintah	7
2.1.1. Definisi Peran.....	7
2.1.2. Definisi Peran Pemerintah.....	9
2.1.3. Konsep Peran Pemerintah	11
2.1.4. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Pariwisata Terhadap Pendapatan	14
2.2. Pengelolaan.....	15
2.2.1. Definisi Pengelolaan	15
2.2.2. Pengelolaan Objek Wisata	16
2.2.3. Konsep Pengelolaan.....	17
2.3. Pariwisata.....	18
2.4. Landasan Peraturan Pariwisata	19
2.5. Kerangka Berpikir	22
2.6. Pembahasan Penelitian Yang Relevan.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Pendekatan Penelitian.....	26
3.2. Fokus Penelitian.....	26
3.3. Lokasi Penelitian	27
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	27
3.5. Informan Penelitian	28
3.6. Teknik Pengumpulan Data	29
3.7. Teknik Analisa Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Jaya.....	31
4.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Aceh Jaya	32
4.1.2. Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Jaya.....	33
4.1.3. Kondisi Demografis Kabupaten Aceh Jaya	33
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	34
4.2.1. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Aceh Jaya	34
a. Planing.....	35
b. Directing.....	36
b. Organizing.....	38
b. Evaluating	40
4.2.2. Konsep Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Aceh Jaya.....	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	46
5.1. Kesimpulan.....	46
5.2. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	50
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dana PAD Aceh Jaya Tahun 2018-2021	3
Tabel 3.1. Dimensi dan Indikator Pengelolaan	24
Tabel 3.1. Informan Penelitian.....	26



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	21
-----------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara.....	51
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang memiliki sumber daya alam yang sangat berpotensi dengan keanekaragaman suku, agama, adat istiadat, ras, dan budaya. Keberagaman yang dimiliki tersebut menjadi keuntungan dalam maju dan berkembangnya pemerintahan Indonesia. Sumber daya alam adalah aset utama yang harus dikelola dengan sedemikian rupa karena kekayaan dan keindahan yang dimiliki Indonesia, kini dapat menjadi salah satu sektor yang dapat menyumbang pendapatan bagi negara.¹

Selain mampu melestarikan alam, memajukan kebudayaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kepariwisataan juga bertujuan untuk menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menggantikan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990. Secara regulatif, Undang-undang tersebut bertujuan untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar dapat membantu terciptanya Sustainable Tourism Industry. Undang-undang sebelumnya belum mampu mengatasi permasalahan ataupun menjawab tantangan mengenai pariwisata Indonesia. Sektor pariwisata dapat dikatakan bersentuhan langsung dengan masyarakat dari tingkat ekonomi yang paling bawah, karena masyarakatlah yang akan melakukan kontak langsung dengan para wisatawan.² Untuk itulah Undang-undang 2 Nomor 10 Tahun 2009 ini ditetapkan, sehingga para pengrajin, pemandu wisata, dan para pelaku wisata kecil dan menengah dapat dibina dan dikembangkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam dekade ini perkembangan pariwisata sudah sedemikian pesat dan terjadi suatu fenomena yang sangat global dengan melibatkan jutaan manusia baik

¹ A.Yoeti, Oka, *Perencanaan Strategi Pemasaran Daerah Wisata*, (PT Pradaya Paramita: Jakarta, 2002), Hlm. 19

² Prasiasa, Dewa Putu Oka, *Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), Hlm. 39

kalangan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Perkembangan dunia pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk, maupun sifat perkembangan itu sendiri. Pariwisata merupakan sektor yang bisa menunjang kemajuan suatu daerah, terutama dengan adanya peraturan mengenai otonomi daerah. Kegiatan ini diberlakukan salah satunya atas dasar karena masyarakat daerah memiliki modal yang dapat diandalkan untuk kemajuan daerahnya, salah satunya adalah melalui kegiatan pariwisata. Peranan pariwisata dalam pembangunan secara garis besar berintikan tiga segi yakni segi ekonomis (devisa, pajak-pajak), segi kerjasama antar negara (persahabatan antarbangsa), segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan mancanegara).

Aceh Jaya adalah sebuah daerah atau kabupaten yang diresmikan pada tanggal 10 April 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan wilayah pesisir Barat pantai Sumatera dengan panjang garis pantai lebih kurang 160 kilometer. Aceh Jaya memiliki luas wilayah 3.814 km² dengan tingkat kepadatan penduduknya sebesar 21,17 jiwa/km² dan populasi penduduk mencapai 87,622 jiwa. Wilayah administrasinya terdiri dari 9 Kecamatan, 21 Mukim dan 172 Desa. Rata-rata mayoritas penduduknya beragama Islam dengan mata pencaharian dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.³

Keadaan geografis Aceh Jaya mempunyai tempat-tempat yang sangat berpotensi menjadi objek wisata yang sangat menarik. Maka tidak heran saat ini Aceh Jaya memiliki 57 objek wisata.⁴ Oleh karena itu Kolaborasi oleh pemda dan pelaku usaha untuk mendukung para sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Jaya sangat perlu di laksanakan dengan baik.

Kabupaten Aceh Jaya memiliki banyak potensi wisata alam yang sangat potensial jika dikembangkan dengan baik. Meskipun Kabupaten Aceh Jaya memiliki sejumlah potensi wisata alam yang sangat baik, namun sebagian besar

³ Badan Pusat Statistik(BPS). *Aceh Jaya dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik Aceh Jaya.

⁴ Dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga *Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022*.

belum tergarap secara maksimal. Banyak pengelolaan wisata di Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat dari keadaan sarana dan prasarana wisata di berbagai tempat objek wisata yang belum lengkap dan tidak terawat.

Aceh Jaya memiliki banyak bisnis wisata ini sudah lebih dari (6 tahun) sejak berdirinya dari tahun 2016 yang mempunyai tempat wisata yang baru yaitu Pantai Cleopatra Calang yang ada di Kabupaten Aceh Jaya, di tempat tersebut memiliki rumah makan kuliner yang khas bernama Dargé selain kulinernya di tempat tersebut juga kita bisa menikmati pemandangan yang eksotis, yang bisa menghilangkan stres di sepanjang garis jalan barat selatan yang banyak di singgahi oleh para pengunjung yang melintasi jalan tersebut. Selain letaknya yang strategis di Aceh Jaya sendiri hampir di setiap kecamatan memiliki tempat wisata sendiri seperti hutan mangrove yang memiliki keindahan alam sungai yang indah yang bisa dilalui dengan perahu yang disediakan khusus untuk wisatawan yang ingin melihat-lihat pemandangan sekitaran hutan mangrove terletak di Rigaeh Aceh Jaya keberadaan tempat wisata tersebut di kelola dengan berbagai tujuan dan upaya.⁵

Potensi objek wisata di Kabupaten Aceh Jaya apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik dan tepat maka akan menjadi tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi. Selain itu, dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung maka akan secara langsung meningkatkan PAD.

Tabel 1.1 Dana PAD Aceh Jaya Tahun 2018-2021

No	Pad Aceh Jaya	Tahun
1	72.776.854.246,39	2021
2	58.624.901.408,09	2020
3	52.599.500.274,00	2019
4	45.774.374.212,02	2018

Sumber: Kemenkeu Kab. Aceh Jaya (2023)

Dari tabel di atas dapat dilihat besaran PAD yang juga berasal dari sektor pariwisata yang diterima pemerintah masih sangat minim, diakibatkan oleh belum maksimalnya pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah. Kolaborasi

⁵ Ayu Karlina, *Strategi Pengembangan Potensi Wisata Alam di Kabupaten Aceh Jaya*,

oleh pemda dan pelaku usaha untuk mendukung para sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Jaya, belum sesuai dengan harapan. Pelaksanaan lapangan masih belum maksimal.

Pengelolaan objek wisata di Kabupaten Aceh Jaya sangat penting untuk dilakukan agar objek wisata tersebut dapat menjadi pusat daya tarik sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut antara lain seperti transportasi, rumah makan, kamar mandi, tempat parkir dan lain sebagainya.⁶ Objek wisata yang dimiliki Aceh Jaya tersebut, maka pengembangan wisata perlu digarap dengan serius dan terus dimaksimalkan agar memperbaiki performa wisata menjadi lebih menarik dan berkualitas agar ke depan target yang ingin dicapai akan terwujud dan kunjungan semakin meningkat tentunya dengan cara menyusun strategi-strategi yang tepat untuk mendukung berjalannya pengembangan wisata. Sehingga diperlukan peran pemerintah seperti peran Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga (disparekrafpora) Aceh Jaya dalam melakukan pengelolaan sehingga strategi yang dilakukan menjadi penting dalam pengembangan wisata karena dengan adanya strategi dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan yaitu berkembangnya wisata dengan optimal.

Beberapa permasalahan dan penyebab pengelolaan pariwisata tidak maksimal dikarenakan potensi wisata di Kabupaten Aceh Jaya dapat menjadi suatu potensi dan investasi ekonomi yang besar dimasa yang akan datang jika dikelola dengan baik. Namun objek wisata tersebut dapat dikatakan belum dikelola dengan baik, hal ini diketahui dari fasilitas yang tersedia masih kurang, fasilitas yang dimaksud diantaranya seperti tempat ibadah, toilet dan lain-lain. Selain fasilitas, untuk informasi mengenai objek wisata Aceh Jaya juga belum diketahui oleh banyak orang. Upaya pengembangan objek wisata di Kabupaten Aceh Jaya dilakukan agar dapat bermanfaat lebih optimal mengingat potensi yang ada di Kabupaten Aceh Jaya sehingga dapat memberikan tambahan pendapatan

⁶ *Ibid.*, 30

bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata maupun dapat menambah pendapatan asli daerah PAD kabupaten Aceh Jaya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mempunyai hambatan terbesar terutama terletaknya belum mampu mendesain atau merencanakan secara terpadu program-program pengembangan pariwisata. Bahkan keindahan potensi yang terkandung, pengelolaan nyaris terabaikan karena alasan dana dan kurangnya investor melirik. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti menarik untuk mengangkat judul “Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Jaya”

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan sektor pariwisata di kabupaten Aceh Jaya?
2. Bagaimana kosep pengelolaan pariwisata di kabupaten Aceh Jaya?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Jaya?
2. Untuk mengetahui konsep pengelolaan pariwisata di kabupaten Aceh?

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak yang membacanya maupun secara langsung yang terkait di dalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu administrasi Negara khususnya. Kemudian juga sebagai bahan pemahaman bagi peneliti dan mahasiswa untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan lebih mendalam mengenai kolaborasi pengelolaan oleh Pemda dan pelaku usaha untuk mendukung para sektor pariwisata di kabupaten Aceh Jaya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam kolaborasi pengelolaan oleh Pemda dan pelaku usaha untuk mendukung para sektor

pariwisata. Di samping itu, penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagaimana kolaborasi pengelolaan oleh Pemda dan pelaku usaha untuk mendukung para sektor pariwisata di kabupaten Aceh Jaya. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memberi dampak kesejahteraan, kemanfaatan, dan lapangan pekerjaan berdasarkan pengelolaan wisatawan pada objek wisata alam di Aceh Jaya.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran Pemerintah

2.1.1. Definisi Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁷ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁸

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm. 77

⁸ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 86.

dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁹

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan media online terutama pada media yang penulis teliti yaitu sripoku.com, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang media itu sendiri.¹⁰

Jenis-jenis Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:¹¹

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

⁹ S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 17 September 2022 Pukul 23.13 WIB.

¹⁰ Kustini, *Ibit*, Hlm. 7.

¹¹ Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007),Hlm. 25.

2.1.2. Definisi Peran Pemerintah

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (pasal 18) menyebutkan: "Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Secara umum, pemerintah daerah perlu menata dalam mengelola kepariwisataan disatu sisi meningkatkan budaya daerah untuk menjadi budaya nasional, sedangkan disisi lain pengelolaan pariwisata tetap mengikuti tatanan hukum yang berlaku terhadap tata kelola kepariwisataan itu sendiri dengan menitikberatkan pada objek lokal, kemampuan lokal, dan kearifan lokal. Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa: "(1) Setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata; melakukan usaha pariwisata; menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas: menjadi pekerja/buruh; konsinyasi; dan/atau pengelolaan".¹²

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (pasal 6) menyebutkan bahwa: "Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata". Didasari pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 pasal 6 menyebutkan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dengan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.¹³

Pasal 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyebutkan bahwa: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban: (a) menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan

¹² Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

¹³ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

keselamatan kepada wisatawan. (b) menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum. (c) memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali. (d) mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas”.¹⁴

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan. Fungsi pemerintah yaitu mengarahkan masyarakat dalam kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran,tidak serta merta di bebaskan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain :¹⁵

1. Peran pemerintah sebagai fasilitator Peran pemerintah sebagai fasilitator memiliki suatu masalah tentang pemerintah belum menyiapkan fasilitator yang cukup untuk mengelola tempat wisata, pemerintah kurang memberikan motivasi kepada masyarakat mengenai bagaimana mengelola parawisata.
2. Pemerintah sebagai regulator Peran pemerintah sebagai regulator memiliki suatu masalah tentang peraturan yang belum cukup baik untuk menciptakan objek wisata. Regulator belum menjamin tempat wisata yang baik. Pemerintah belum menyiapkan peraturan tentang wisatawan tidak boleh menebang pohon, wisatawan tidak boleh membuang sampah sembarangan, dan wisatawan tidak boleh mengganggu satwa.

¹⁴ Pasal 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

¹⁵ Angga Prasetyo dan Marsono, “*Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal*”, Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro (2011): 153.

3. Perann pemerintah sebagai motivator Peran pemerintah sebagai motivator memiliki suatu masalah tentang pemerintah kurang melakukan sosialisasi tentang bagaimana cara mengembangkan potensi parawisata alam.

2.1.3. Konsep Peran Pemerintah

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal, Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, pemerintah aceh, dan pemerintah kabupaten. Pariwisata halal merupakan kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyediakan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah. Indikator pariwisata halal meliputi : 1. Destinasi. 2. Akomodasi. 3. Usaha makanan dan minuman. 4. Jasa pelayanan Kesehatan dan kecantikan halal dan. 5. Biro perjalanan.¹⁶

Davey memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, antara lain pertama sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya. Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan. Ketiga, fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka. Kelima, fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.¹⁷

Kuncoro menyatakan bahwa peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator dan stimulator:

- a. Wirausaha (entrepreneur), sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah

¹⁶ Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal

¹⁷ Davey, K.J, *Pembiayaan Pemerintah Daerah. Penerjemah Amanulah*, J(akarta: UI Press, 1988)

untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan perekonomian di sekitar.

- b. Koordinator, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai coordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.
- c. Fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.
- d. Stimulator, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha, dalam bidang kepariwisataan pemerintah daerah dapat mempromosikan tema atau kegiatan khusus di objek wisata tertentu.¹⁸

Disinilah Organisasi Pariwisata Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat memainkan peran penting, terutama melakukan koordinasi terhadap semua potensi dan sumber-sumber daya yang terdapat di daerah itu, sehingga harapan terhadap pariwisata sebagai katalisator bagi pembangunan daerah dapat menjadi kenyataan dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah itu.

¹⁸ Kuncoro, Mudrajad, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Fokusmedia, 2010)

Organisasi pariwisata di daerah sangat ideal kalau dapat menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPA) yang diharapkan dapat dijadikan pedoman pengembangan dan perencanaan pemasaran strategis bagi daerah itu sebagai daerah tujuan wisata yang mengharapkan lebih banyak wisatawan berkunjung ke daerah tersebut.

Menurut Oka A. Yoeti ada tiga hal yang mendasar yang dianggap penting dapat mempengaruhi, mengapa diperlukan suatu organisasi pariwisata yang efektif pada suatu daerah, yaitu :¹⁹

- a. Adanya penyebaran arus lalu lintas pariwisata ke arah luar dari pusat-pusat pariwisata yang menyebabkan ketidaksiapan daerah untuk memberikan fasilitas dan kenyamanan yang memuaskan bagi wisatawan.
- b. Meningkatnya kebutuhan daerah, sehingga industri pariwisata diharapkan bisa menjadi katalisator pembangunan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga memerlukan suatu organisasi yang dapat diandalkan mengelola pariwisata sebagai suatu industri.
- c. Kebutuhan wisata yang dimiliki setiap orang menyebabkan pariwisata semakin berkembang pesat, sehingga diperlukan organisasi pariwisata yang dapat meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang datang berkunjung pada suatu daerah.

Secara garis besar peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah melakukan tugas pemerintah dengan mengelola pariwisata dan kebudayaan yang ada di suatu daerah. Secara spesifik adalah memberdayakan masyarakat untuk bersama mengembangkan pariwisata yang ada di daerah. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh ahli, maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta mencakup pendorong bagi masyarakat local agar senantiasa mendukung perkembangan pariwisata di wilayahnya (motivator), penyediaan fasilitas pendukung pariwisata (fasilitator), kerjasama yang sinergis dengan berbagai stakeholder pariwisata (dinamisator).

¹⁹ A, Yoeti, Oka, *Pengantar Ilmu Pariwisata Edisi Revisi*, (Bandung: Angkasa, 2008)

2.1.4. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Pariwisata Terhadap Pendapatan

Semakin berkembangnya pariwisata di suatu daerah, maka secara otomatis akan mempengaruhi aktivitas penduduk yang dekat dengan obyek wisata tersebut. Oleh karena itu perlu dirumuskan suatu kebijakan pariwisata Kabupaten Aceh Jaya yang dirumuskan sebagai suatu tindakan instansi pemerintah dan badan organisasi masyarakat yang mempengaruhi kehidupan dalam bidang pariwisata itu sendiri. Suatu daerah yang mengembangkan pariwisata sebagai suatu industri di daerahnya, maka lalu- lintas orang-orang (wisatawan) tersebut ternyata memberi keuntungan dan memberi hasil yang bukan sedikit dan bahkan memberikan pendapatan utama. Sebagai akibat lebih jauh, dengan adanya lalu-lintas orang-orang yang melakukan perjalanan wisata tadi, yaitu mereka yang mencari kemakmuran lebih, ternyata memberi dampak terhadap perekonomian di daerah yang dikunjungi.²⁰

Dampak yang dimaksudkan antara lain:²¹

1. Memberikan kesempatan kerja atau dapat memperkecil pengangguran.
2. Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan pendapatan daerah.
4. Memberikan efek multiplier dalam perekonomian setempat.

Dengan kata lain dengan adanya tempat wisata tersebut diharapkan dapat menjadi hal yang positif seperti memberikan kesempatan kerja bagi warga sekitar dan dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

²⁰ Ibid., Hlm. 192

²¹ Muhadir, Potret ketenagakerjaan, pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, Jurnal Al-Buhuts, Volume 11 Nomor 1 Juni 2015

2.2. Pengelolaan

2.2.1. Definisi Pengelolaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengelolaan didefinisikan sebagai berikut: ²²

1. Proses, cara, pembuatan mengelola
2. Proses melakukan oerbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain
2. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi
3. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen, manajemen ialah suatu proses yang akan diterapkan pada individu-individu atau kelompok dalam berupaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian tersebut juga dapat diartikan sebagai aktifitas yang didalamnya menerbitkan, mengatur, maupun berpikir yang dilakukan oleh individu sehingga mampu untuk mengemukakan, menata, serta merapikan segala sesuatu yang ada disekitarnya, mengetahui apa prinsipnya serta menjadikan hidup yang selaras dan serasi dengan lainnya.

Pengelolaan (management) merupakan proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Manajemen merupakan proses dalam memperoleh suatu tindakan dari orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Aktivitas manajerial itu dilaksanakan oleh para manajer dalam sebuah organisasi sehingga dapat mendorong sumber daya personel bekerja yang memanfaatkan sumber daya lainnya sehingga tujuan organisasi yang disepakati bersama dapat tercapaian.²³

²² KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online]. Available at: <http://kbbi.web>

²³ Alvinita Hamel, *Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Kepulauan Sangehe*, (Administrasi Publik, 2016), Hlm. 79

2.2.2. Pengelolaan Objek Wisata

Ada tiga faktor yang dapat menentukan berhasilnya pengelolaan pariwisata sebagai industri, ketiga faktor tersebut diantaranya adalah tersedia fasilitas, objek atraksi wisata, dan aksesibilitas, sehingga bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. Faktor lain yang cukup penting adalah fasilitas, tersedianya fasilitas-fasilitas seperti penginapan, restoran, hiburan dan transportasi lokal yang memungkinkan wisatawan bepergian, ketempat-tempat tersebut, beserta alat komunikasi. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pada Bab 1 pasal 1 wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Jadi pengertian itu mengandung unsur yaitu:²⁴

1. Kegiatan perjalanan
2. Dilakukan secara sukarela
3. Bersifat sementara

Perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati objek dan daya tarik wisata didasarkan pada perencanaan yang matang. Perencanaan berarti melakukan perencanaan terhadap segala sesuatu sebagai perencanaan dimasa yang akan datang. Perencanaan terhadap pariwisata pada dasarnya harus dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disebabkan karena sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi salah satu andalan bagi suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dalam perencanaan pariwisata, kecenderungan pertumbuhan penduduk, ketersediaan lahan cadangan, pembangunan fasilitas, dan kemajuan teknologi serta penerapannya harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pariwisata.²⁵ Selain itu, kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisata tentunya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap

²⁴ Alvinita Hamel, *Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe*, (Administrasi Publik, 2016), Hlm. 79

²⁵ Hadiwijoyo, S. S, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), Hlm. 101

kemajuan industri pariwisata tersebut, hal ini disebabkan dalam mengelola pariwisata diperlukan keahlian dan pengalaman, bahwa berapapun banyaknya modal yang dimiliki, namun pembangunan tidak akan terlaksana kecuali disertai dengan sumber daya managerial yang mampu mengelola modal tersebut untuk pembangunan. Hal perlu diperhatikan dalam pengelolaan daya tarik wisata yang potensial harus dilakukan melalui penelitian, inventarisasi, dan evaluasi, sebelum fasilitas wisata dikembangkan. Hal ini penting agar perkembangan daya tarik wisata yang ada ditempat sesuai dengan keinginan pasar potensial dan untuk menentukan pengelolaan yang tepat dan sesuai.

2.2.3. Konsep Pengelolaan

Menurut Geroge R. Terry menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan

bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.²⁶

Dalam proses pelaksanaan kegiatan perencanaan, manusia menggunakan material atau bahan-bahan yang mendukung, karenanya dianggap pula sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian pula dalam proses pelaksanaan kegiatan perencanaan, terlebih dalam kemajuan teknologi pada dewasa ini manusia bukanlah lagi sebagai pembantu bagi mesin sebagai terlihat pada masa sebelum revolusi industri malahan telah terjadi sebaliknya, mesin telah berubah kedudukannya menjadi sebagai pembantu bagi manusia. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna maka manusia dihadapkan daripada berbagai alternatif methods atau cara melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu metode atau cara yang dianggap pula sebagai sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan.

2.3. Pariwisata

Kata pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali dan berputar-putar, jadi pariwisata berarti perjalanan atau bepergian yang dilakukan berkali-kali atau berkeliling. Berdasarkan arti kata ini, pariwisata didefinisikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari satu tempat ketempatlain dengan maksud dan tujuan tertentu. Menurut Suzanna, Pariwisata adalah Suatu proses bepergian seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Sedangkan menurut. Robinson Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Pariwisata berkembang karena adanya gerakan manusia dalam mencari sesuatu yang belum diketahuinya, menjelajah wilayah yang baru, mencari perubahan suasana, atau mendapat perjalanan baru.

Perjalanan wisata yang dilakukan oleh orang-orang tertentu tidak akan terjadi apabila tidak ada hal yang mendasarinya. Ada halhal yang mendorong atau

²⁶ George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen, (Principles of Management)*, Terj. G.A. Ticoalu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 342.

mengest orang-orang itu melakukan perjalanan wisata. Menurut Oka A. Youti dalam Pengantar Ilmu Pariwisata (1996). Ada empat motivasi yang mendorong seseorang melakukan suatu kegiatan kepariwisataan:²⁷

- a. Motivasi untuk memenuhi kebutuhan fisik Motivasi ini berhubungan dengan penyegaran tubuh dan pikiran, tujuan kesehatan, olahraga, dan bersenang-senang. Motivasi ini berhubungan dengan segala kegiatan yang berfungsi mengurangi segala ketegangan.
- b. Motivasi untuk mengenal budaya Motivasi ini diidentifikasi dengan keinginan untuk melihat dan mengetahui lebih banyak tentang budaya negara lain baik itu tari-tariannya, cara berpakaian, music, kesenian, dan cerita rakyat.
- c. Motivasi untuk berhubungan dengan orang lain Keinginan untuk bertemu dengan orang-orang baru, mengunjungi teman dan keluarga yang jauh, dan mencari pengalaman baru yang berbeda. Berwisata dengan tujuan untuk melepaskan diri hubungan yang rutin dengan para teman dan tetangga di mana mereka berasal.
- d. Motivasi untuk memperoleh status dan prestasi. Motivasi-motivasi ini dikaitkan dengan keinginan seseorang agar mereka dihargai, dihormati dan dikagumi dalam rangka memenuhi ambisi pribadi.

Dengan demikian, pengembangan pariwisata perlu didukung dengan perencanaan yang matang dan harus mencerminkan tiga dimensi kepentingan, yaitu industri pariwisata, daya dukung lingkungan (sumber daya alam) dan masyarakat setempat dengan sasaran untuk peningkatan kualitas hidup.

2.4. Landasan Peraturan Pariwisata

Dalam melakukan tatanan kehidupan masyarakat sebagai zona kepariwisataan sebagai praktek industrialisasi kepariwisataan dengan menciptakan dan pencitraan keamanan, ketertiban dan iklim yang bernuansa islami dan budaya secara kondusif dalam memacu perkembangan usaha pariwisata melalui keterbukaan, kesempatan, informasi, perlindungan hukum dan

²⁷ Oka A. Youti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, 1996, Bandung- Angakasa, Hlm. 59

kemampuan memfasilitasi wisatawan yang datang, baik lokal maupun mancanegara.

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal, Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, pemerintah aceh, dan pemerintah kabupaten. Pariwisata halal merupakan kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyediakan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah. Indikator pariwisata halal meliputi : 1. Destinasi. 2. Akomodasi. 3. Usaha makanan dan minuman. 4. Jasa pelayanan Kesehatan dan kecantikan halal dan. 5. Biro perjalanan.²⁸

Dewan perwakilan rakyat Aceh dan Gubernur Aceh memutuskan qanun Aceh nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan, berikut beberapa pasal yang perlu dibahas: Bab II Pasal 2 Penyelenggaraan kepariwisataan Aceh berasaskan: 1) Iman dan Islam 2) Kenyamanan 3) Keadilan 4) Kerakyatan 5) Kebersamaan 6) Kelestarian 7) Keterbukaan 8) Adat, budaya, dan kearifan lokal.²⁹

Bab II Pasal 3 Penyelenggaraan kepariwisataan Aceh bertujuan: 1) Melestarikan, mempromosikan, mendayagunakan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata. 2) Mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya Aceh yang islami sebagai daya tarik wisata. 3) Memperluas lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha; dan 4) Meningkatkan pendapatan asli Aceh menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Bab II pasal 4 Penyelenggaraan kepariwisataan Aceh berfungsi : 1) Mensyukuri nikmat Allah SWT. 2) Meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air. 3) Meningkatkan taraf hidup jasmani dan rohani. 4) Menambah pengetahuan dan pengalaman. 5) Membangun jiwa kewirausahaan.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (pasal 6) menyebutkan bahwa: "Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui

²⁸ Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal

²⁹ Qanun Aceh nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan

pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata”. Didasari pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 pasal 6 menyebutkan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jansani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dengan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.³⁰

Pasal 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, menyebutkan bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban: (a) menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. (b) menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum. (c) memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali. (d) mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas”.³¹

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (pasal 18) menyebutkan: ”Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Secara umum, pemerintah daerah perlu menata dalam mengelola kepariwisataan disatu sisi meningkatkan budaya daerah untuk menjadi budaya nasional, sedangkan disisi lain pengelolaan pariwisata tetap mengikuti tatanan hukum yang berlaku terhadap tata kelola kepariwistaan itu sendiri dengan menitikberatkan pada objek lokal, kemampuan lokal, dan kearifan lokal. Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menyebutkan bahwa: “(1) Setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata; melakukan usaha pariwisata; menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. (2)

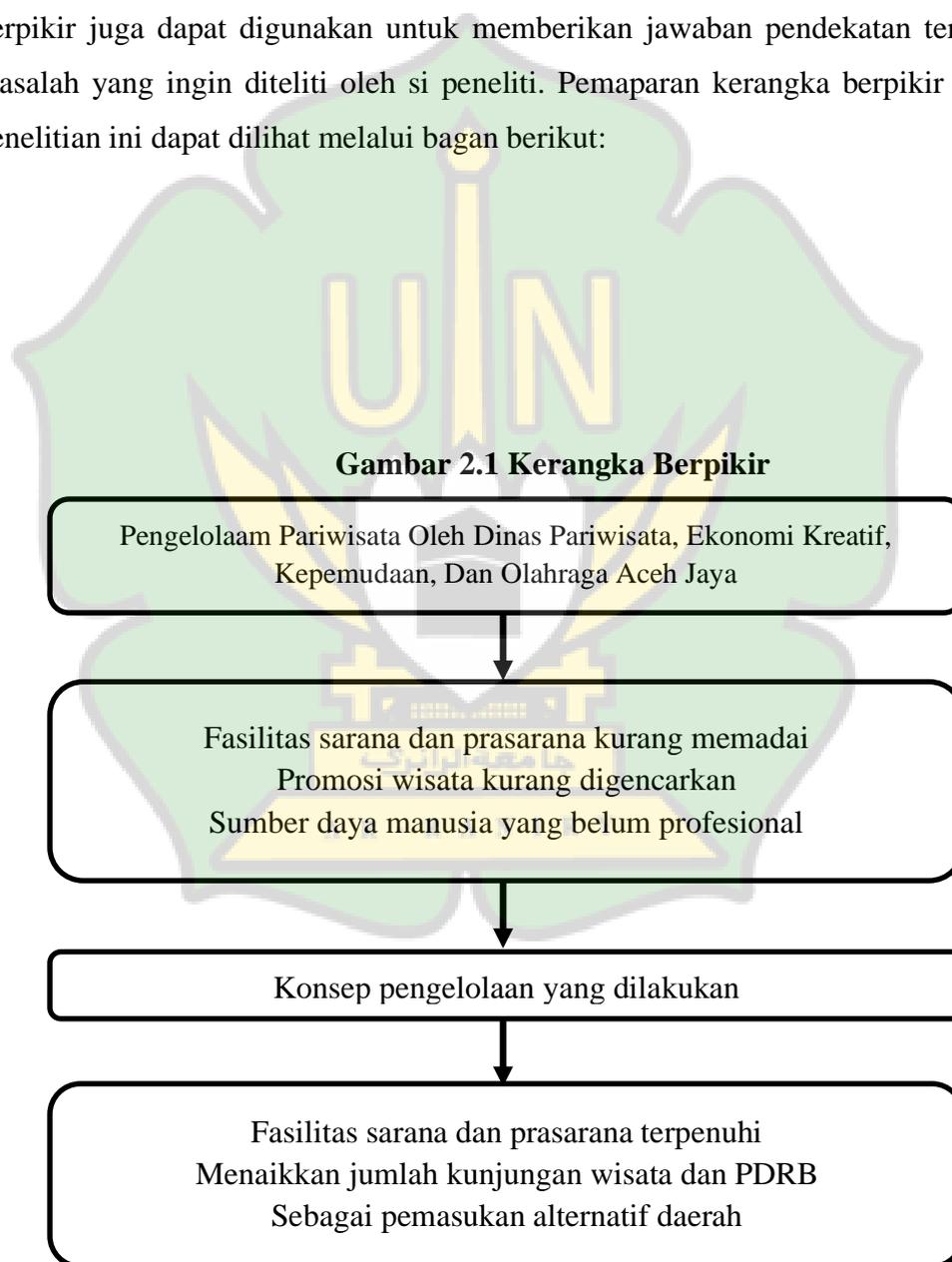
³⁰ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

³¹ Pasal 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas: menjadi pekerja/buruh; konsinyasi; dan/atau pengelolaan”.³²

2.5. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yaitu penjelasan sementara dari gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan dalam sebuah penelitian. Selain itu kerangka berpikir juga dapat digunakan untuk memberikan jawaban pendekatan terhadap masalah yang ingin diteliti oleh si peneliti. Pemaparan kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat melalui bagan berikut:



³² Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Sumber: Data diolah 2023

2.6. Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan penulis teliti sebagai berikut:

1. Skripsi dari Ayu Karlina, jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 dengan judul “Strategi Pengembangan Potensi Wisata Alam di Kabupaten Aceh Jaya”. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan potensi wisata alam di Kabupaten Aceh Jaya serta bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi dalam proses pengembangan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga strategi pemerintah dalam pengembangan potensi wisata alam yaitu melakukan pengembangan pemasaran wisata, pengembangan destinasi wisata serta pengembangan kemitraan. Dari tiga strategi tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini dikarenakan masih sulitnya masyarakat luas memperoleh informasi tentang wisata terutama dari website resminya, kurangnya sarana dan prasarana serta tidak adanya pelatihan untuk tenaga ahli bidang kepariwisataan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengembangan wisata, maka digunakan teori yang dikemukakan oleh Yoeti bahwa ada tiga faktor yang dapat menentukan keberhasilan pengembangan wisata yaitu tersedianya objek dan daya tarik wisata, adanya aksesibilitas dan adanya fasilitas. Dari ketiga faktor tersebut, Kabupaten Aceh Jaya hanya memenuhi satu faktor keberhasilan pengembangan wisata yaitu tersedianya objek dan daya tarik wisata. Adapun yang menjadi peluang dari potensi wisata yang dimiliki adalah peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang kemudian secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh daerah sekaligus dapat berpotensi menjadi destinasi wisata unggulan. Sedangkan yang menjadi tantangan

dalam proses pengembangan potensi wisatanya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap potensi wisata, perencanaan yang belum terintegrasi dengan baik, terbatasnya aksesibilitas fasilitas dan infrastruktur pendukung, belum optimalnya sumber daya manusia yang ada, lokasi wisata yang belum bersih, kurangnya anggaran serta belum rampung nya nomenklatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja pariwisata (SOTK), Qanun Wisata Halal dan belum adanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA).³³

2. Jurnal dari Kartini La Ode Unga. Judul Jurnal “Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Kepulauan Banda.” Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor internal yang mendukung pengembangan pariwisata Kepulauan Banda adalah keragaman atraksi, image kawasan yang sudah terkenal sejak VOC, sifat keterbukaan, keamanan, dan kemudahan mencapai lokasi. Sementara faktor yang menghambat adalah belum adanya pusat informasi wisata, sifat terhadap lingkungan yang sangat rendah, Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata masih rendah serta belum memadai nya akses infrastruktur. Sedangkan faktor eksternal yang mendukung pengembangan pariwisata Kepulauan Banda adalah aksesibilitas, perkembangan teknologi dan informasi, regulasi serta tingginya potensi dan minat wisatawan.³⁴
3. Penelitian Jurnal Agus Ananto Widodo, Hesti Lestari. Judul jurnal Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata Kabupaten Semarang memiliki beberapa faktor pendukung misalnya objek wisata yang beragam dan terus bertambah, lingkungan ekonomi, politik dan sosial budaya yang kondusif, kemampuan SDM yang mumpuni. Di sisi lain

³³ Ayu Karlina, *Strategi Pengembangan Potensi Wisata Alam di Kabupaten Aceh Jaya*,

³⁴ Kartini La Ode Unga, I Made Benyamin, dkk, *Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Kepulauan Banda*, 2011.

pengembangan pariwisata Kabupaten Semarang juga mempunyai faktor yang menjadi penghambat diantaranya adalah sektor industri yang belum mendukung pariwisata, penyediaan informasi yang belum maksimal, penggunaan teknologi yang belum maksimal, kurangnya anggaran, kurangnya jumlah SDM, dan lain-lain.³⁵



³⁵ Agus Ananto Widodo, Hesti Lestari, *Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Semarang*, *Jurnal of Public Policy and Manajemen*, 2016.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dan metode penulisan yang dijadikan acuan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif, yaitu menerapkan proses penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan *result* dan *value* data yang deskriptif. Data yang ditemukan akan dikumpulkan baik berupa hasil ucapan, tulisan dan hal-hal serupa terkait lainnya yang memiliki kontinuitas agar dapat diteliti dan diamati secara berkelanjutan.³⁶

Metode kualitatif merupakan salah satu cara dalam proses penelitian ilmiah yang ditujukan agar dapat mempelajari dengan seksama temuan-temuan yang terjadi pada lingkup penelitian, sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu data yang valid serta deskriptif.

Dengan metode ini, diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan data dan analisis yang bisa merepresentasikan kolaborasi pengelolaan oleh Pemda dan pelaku usaha untuk mendukung para sektor pariwisata di kabupaten Aceh Jaya

3.2. Fokus Penelitian

Tabel 3.1. Dimensi dan Indikator Pengelolaan

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Perencanaan (<i>Planning</i>)	a. Perkiraan b. Perumusan c. Kebutuhan	George R. Terry dan Leslie W. Rue, <i>Dasar-Dasar Manajemen, (Principles of Management)</i> , Terj. G.A. Ticoalu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 342
2	Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	a. Mengaplikasikan Seluruh Kegiatan b. Dilaksanakan Oleh Kelompok Kerja c. Menetapkan wewenang d. Tanggungjawab e. Pencapaian Tujuan	George R. Terry dan Leslie W. Rue, <i>Dasar-Dasar Manajemen, (Principles of Management)</i> , Terj. G.A. Ticoalu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 342

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 9.

3.	Penggerakan (<i>Actuating</i>)	a. Bekerja Secara Sadar b. Pola Organisasi	George R. Terry dan Leslie W. Rue, <i>Dasar-Dasar Manajemen, (Principles of Management)</i> , Terj. G.A. Ticoalu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 342
4.	Pengawasan (<i>Controlling</i>)	a. Penentuan b. Pengukuran c. Koreksi	George R. Terry dan Leslie W. Rue, <i>Dasar-Dasar Manajemen, (Principles of Management)</i> , Terj. G.A. Ticoalu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 342

Sumber: Data diolah, 2023

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian yang sesuai dengan judul yang ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di Kantor dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Jaya di Calang. Adapun alasan peneliti memilih Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Jaya di Calang sebagai lokasi penelitian dikarenakan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat aktivitas kolaborasi pengelolaan oleh Pemda dan pelaku usaha untuk mendukung para sektor pariwisata di kabupaten Aceh Jaya
2. Karena lokasi tersebut memudahkan pendekatan sosial kepada pelaku usaha pariwisata, terutama yang ingin melakukan kolaborasi pengelolaan oleh Pemda dan pelaku usaha untuk mendukung para sektor pariwisata di kabupaten Aceh Jaya.
3. Karena lokasi tersebut mudah dijangkau oleh peneliti sehingga bisa menghemat biaya dalam penelitian ini.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat peneliti dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau pengisian

kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.³⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang berkaitan dengan kolaborasi pengelolaan oleh Pemda dan pelaku usaha untuk mendukung para sektor pariwisata di kabupaten Aceh Jaya. Untuk memperoleh data tersebut, peneliti melakukan observasi, wawancara dengan informan penelitian dan dokumentasi.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur dan artikel yang di dapat dari *website* yang berkaitan penelitian.³⁸ Yaitu yang berkaitan dengan kolaborasi pengelolaan oleh Pemda dan pelaku usaha untuk mendukung para sektor pariwisata di kabupaten Aceh Jaya. Atau data yang berasal dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut. Untuk memperoleh data tersebut peneliti mengambil beberapa buku, *website*, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5. Informan Penelitian

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Pelaku Usaha Pendukung Para Sektor Pariwisata	5 Orang
2	Kepala Disparekrafpora Aceh Jaya	1 Orang
3	Pegawai Disparekrafpora Aceh Jaya	2 Orang
Jumlah		8 Orang

Sumber: Data diolah, 2023

³⁷ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 103

³⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kenacana, 2015), hlm. 122

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁹

Adapun teknik pengumpulan data, penulis menggunakan dua teknik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam observasi peneliti menggunakan pengamatan panca indera dengan mengamati langsung di lokasi penelitian. Tujuan observasi ini agar lebih mengenal situasi yang berada didalamnya dan dapat mengumpulkan keterangan yang lebih banyak.

Adapun yang menjadi bahan pengamatan peneliti adalah kolaborasi pengelolaan oleh Pemda dan pelaku usaha untuk mendukung para sektor pariwisata di kabupaten Aceh Jaya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses penelitian dengan cara bertatap muka dan tanya jawab. Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Sedangkan wawancara tidak berstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.⁴⁰

Peneliti akan melakukan wawancara kepada pegawai dinas pariwisata, pelaku usaha untuk mendukung para sektor pariwisata di Calang kabupaten Aceh Jaya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud oleh peneliti adalah mencari data yang berupa catatan, buku, agenda dan sebagainya yang ada di Dinas Pariwisata

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm. 308

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Putra, 2016), hlm. 227.

Kabupaten Aceh Jaya. Dengan adanya dokumentasi ini, akan menjadi bukti nyata dalam penelitian yang bisa dilihat langsung pada pembaca sehingga pembaca dapat mudah melihat atau menangkap masalah yang terjadi di sekitar penelitian yang telah peneliti lakukan.

3.7. Teknik Analisa Data

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu suatu metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan dilakukan berbagai macam teknik analisis data. Diantaranya penyelidikan yang memutuskan, menganalisa, dan mengaplikasi, serta mengambil kesimpulan.

Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis dan diklasifikasikan. Pengklasifikasian dan penganalisaan semua data ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Mengumpulkan sejumlah data untuk diseleksi dan dilakukan analisis.
- 2) Menyeleksi data-data yang relevan dengan penelitian.
- 3) Menganalisis (membahas) serta menyimpulkan.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan, menyeleksi, memutuskan, menganalisa, dan mengaplikasikan, serta mengambil kesimpulan.

⁴¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 277

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Jaya

Kabupaten Aceh Jaya dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Barat dan terletak di wilayah pantai Barat Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Jaya mulanya dibangun oleh Sultan Saidil Mukawil (1588-1604 M) lalu dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) dengan mendatangkan orang-orang dari Aceh Besar dan Pidie. Kerajaan pertama “Negeri Daya” muncul akhir abad ke -16 M dengan rajanya bernama Sultan Alaidin Riatsyah bergelar Po Teumerehom Daya. Saat ini, kerajaan tersebut berlokasi di Kecamatan Indrajaaya. Pada zaman penjajahan Belanda, wilayah Kabupaten Aceh Jaya sekarang ini merupakan onderafdeeling dari Afdeeling Westkust van Atjeh (Aceh Barat), salah satu dari empat afdeeling wilasyah Kresidenan Aceh. Afdeeling Westkust van Atjeh merupakan suatu daerah administratif yang meliputi wilayah pantai barat Aceh dari Gunung Geurute sampai Singkil dan Kepulauan Simeulue.⁴²

Setelah Indonesia merdeka, sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara, Wilayah Barat dimekarkan menjadi dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat terdiri 3 wilayah yaitu Meulaboh, Calang dan Simeulue. Wilayah Calang menjadi daerah otonom setelah memekarkan diri dari Kabupaten induk

⁴² www.acehjayakab.go.id. (Diakses pada tanggal 26 Maret 2023).

menjadi Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002.⁴³

4.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Aceh Jaya

Visi : Mewujudkan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya yang sehat, Kejayaan, Agama, Tangguh, Infrastruktur dan Informatika (Gerbang Raja Sejati).

Misi :

1. Meningkatkan mutu dan mengantarkan pelayanan kesehatan sampai ke rumah masyarakat.
2. Memperketat pertumbuhan ekonomi mikro dan memperbesar akses ekonomi mikro dalam rangka kemandirian ekonomi dan menggerakkan sektor-sektor pertumbuhan PDRB.
3. Kejayaan agama dapat ditingkatkan perhatian melalui peningkatan pembangunan pendidikan agama Islam, fasilitas sarana ibadah.
4. Meningkatkan pembangunan yang tangguh di segala bidang, pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur, pengurangan risiko bencana alam dan kerusakan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan mutu pendidikan termasuk pendidikan umum, sarana dan prasarana dan memperkuat daya kompetensi pembinaan pemuda olahraga serta sosial budaya.
6. Menciptakan good government transparansi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

4.1.2. Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Jaya

Kabupaten Aceh Jaya merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Secara administratif luas wilayah Kabupaten Aceh Jaya adalah 387.272,36 Ha atau 3.873 Km² dengan Ibukota Kabupaten terletak di Calang. Secara geografis wilayah Kabupaten Aceh Jaya terletak pada lokasi 04022' sampai 05016' LU dan 95010' sampai 96003'BT. Wilayah Aceh Jaya merupakan bagian pantai barat dan daratan Kepulauan Sumatera yang membentang dari Barat ke Timur mulai dari Kaki Gunung Geurute (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai ke sisi Cot Paleng (perbatasan dengan Aceh Barat). Berdasarkan letak geografis wilayah Kabupaten Aceh Jaya berbatasan dengan: Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie di sebelah Utara, Kabupaten Aceh Barat dan Samudera Hindia di sebelah Selatan, Kabupaten Aceh Barat sebelah Timur dan di sebelah Barat berbatasan dengan Pantai Sumatera.⁴⁵

4.1.3. Kondisi Demografis Kabupaten Aceh Jaya

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Akhir Tahun 2022, penduduk Kabupaten Aceh Jaya berjumlah 97.124 jiwa yang terdiri dari 49.137 jiwa (52 persen) laki-laki dan 47.987 jiwa (48 persen) perempuan, sedangkan untuk konsentrasi jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Jaya terdapat di Kecamatan Krueng Sabee dengan proporsi terbesar yaitu 18.557 jiwa, kecamatan Jaya sebanyak 15.836, kecamatan Teunom sebanyak 14.089 jiwa, kecamatan Setia Bakti sebanyak 9.461 jiwa, kecamatan Panga sebanyak 9.030 jiwa, kecamatan sampoiniet sebanyak 8.192 jiwa, kecamatan Indra Jaya sebanyak 7.548,

⁴⁵ *Ibid.*

kecamatan Darul Hikmah sebanyak 7.236 dan proporsi terendah di kecamatan Pasie Raya sebanyak 7.185.⁴⁶

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Aceh Jaya

Peran pemerintah dalam mengelola sektor pariwisata di kabupaten Aceh Jaya memerlukan manajemen proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Melalui manajemen pariwisata yang baik dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana mampu meningkatkan kualitas wisata sehingga mampu menarik minat wisatawan / pengunjung untuk datang. Berikut merupakan peran pemerintah dalam sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Jaya. Pengelolaan (manajemen) menurut Leiper merujuk kepada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut. Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a) Planning (perencanaan)
- b) Directing (mengarahkan)
- c) Organizing (termasuk coordinating)
- d) Controlling (pengawasan)

⁴⁶ Bappeda.acehjayakab.go.id. (Diakses pada tanggal 26 Maret 2023).

⁴⁷ Leiper, P, *Tourism Management*. (Victoria. RMIT: Collingwood. Victoria. RMIT: Collingwood, 1990)

1. Planing (Perencanaan)

Perencanaan merupakan suatu pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan, membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dengan penuh keyakinan untuk tercapainya hasil yang dikehendaki. Dalam melakukan manajemen pariwisata diperlukan perencanaan yang baik sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala Disparekrafpora Aceh Jaya yang menyebutkan bahwa:

“Langkah pertama yang kita lakukan adalah memilih dulu 10 destinasi unggulan setelah itu kita bangun sarana atau fasilitas yang dibutuhkan seperti toilet,mushala,jalan dan lain-lain. Maka program kita adalah untuk mempromosikan 10 destinasi unggulan yang sudah kita pilih dan langkah disparekrafpora beserta pemerintahan Aceh Jaya ialah untuk memfasilitasi terlebih dahulu 10 destinasi unggulan yang ada di Aceh Jaya”⁴⁸

Berdasarkan informasi diatas dapat diketahui bahwa perencanaan yang dilakukan oleh Disparekrafpora Aceh Jaya lebih pada menetapkan 10 destinasi wisata unggulan dan melakukan promosi kepadanya. Perencanaan perlu dilakukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini Disparekrafpora Aceh Jaya ingin mewujudkan Aceh Jaya sebagai destinasi wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Perencanaan yang dilakukan juga merupakan dari pengembangan destiniasi wisata menjadi wisata unggulan bagi Aceh Jaya. Disparekrafpora Aceh Jaya juga melakukan sosialisasi kemasyarakat sekitar tentang pentingnya pariwisata dan membuat jalinan kerjasama dengan pemerintah dan melibatkan

⁴⁸ Wawancara dengan Kepala Disparekrafpora Aceh Jaya Pada Tanggal 7 April 2023

pihak-pihak terkait. Hasil wawancara dengan pegawai Pegawai Disparekrafpora Aceh Jaya yang mengatakan bahwa:

“Mengenai pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata di Aceh Jaya itu disesuaikan dengan temu ramah dengan pokdarwis juga melibatkan kepala dinas, Bupati, Sekda itu di Aceh Jaya fokuskan di 10 destinasi wisata Aceh Jaya di sekaligus dengan pengembangannya salah satunya di Poeteumerhoem dan kampung portugis di Kuala Daya, habis itu di ie jernih di CRU Sarah deu, ekowisa Manggrove, Pasi Luwah, Pantai Lhoekgeuleumpang, ceraceu eumbon, lhoeng gayo dan di Pantai Panorama”⁴⁹

Dalam perencanaan pemerintah berperan dalam melakukan manajemen pariwisata mengacu pada promosi yang dilakukan pada 10 destinasi wisata utama di Aceh Jaya yaitu: Situs Makam Poeteumeurhoem, gampomg Portugis, Sadar lestari/CRU Sarah Deu, Eko Wisata Manggrove, Pantai Lhok Geuleumpang, Pantai Panorama, Pasie Luwah, Pantai Nissero, Ceuraceu Eumbon, Pantai Lueng Gayo dan membangun sarana dan prasarana untuk menaikkan minat kunjung wisata. Bersumber dari acuan tersebut tugas Disparekrafpora Aceh Jaya menjadi lebih kongkrit yaitu menjadi fasilitator, fasilitator atas pembangunan wisata, fasilitator dalam membangun sarana dan prasarana yang diperlukan dan menarik investor dalam usaha pengembangan pariwisata.

2. Directing (Mengarahkan)

Ada dua aspek dalam penggerakan pertumbuhan wisata, yaitu mengupayakan adanya dukungan partisipasi dari semua pihak yang terlibat memberikan motivasi, dan mengembangkan potensi secara optimal dan hal penghambat dalam mencapai tujuannya. Pariwisata di Aceh jaya memiliki potensi

⁴⁹ Wawancara dengan Pegawai Disparekrafpora Aceh Jaya Pada Tanggal 7 April 2023

pengembangan pariwisata kedepannya seperti menciptakan daerah wisata yang banyak diminati oleh wisatawan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari beberapa pihak khususnya pemerintah dan masyarakat dalam mendukung program pembangunan wisata. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu pegawai Disparekrafpora Aceh Jaya yang menyatakan bahwa:

“Faktor pendukung bnyak kalau dinas dan juga pemerintah tidak tutup mata kalau tempat wisata itu berjalan dengan bagus seseuai dengan syariah kami akan dukung dan juga untuk setiap kegiatan-kegiatan wisata baik di akhir tahun, rabu abeh, kita akan dibantu dari pemerintah kabupaten kalau dari pematauan ada WH dan kepolisian yang bahwa lokasi itu kita dukung”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah juga ikut mendukung wisata di Aceh Jaya dengan juga melakukan pemantauan dan penertiban di tempat wisata dengan menurunkan aparat kepolisian hingga WH jika diperlukan. Kawasan objek wisata di Aceh Jaya telah berjalan sesuai dengan syariah, kegiatan wisata tidak diperbolehkan berduaan di tempat wisata bagi pasangan non muhrim dan diharuskan berpakaian sopan dan tertutup. Pengunjung wisata juga dilarang membawa benda yang dapat membahayakan diri sendiri bahkan orang lain. Proses penggerakan wisata di Aceh Jaya telah diupayakan semaksimal mungkin dengan pemanfaatan seluruh anggaran pemerintah yang disalurkan untuk kegiatan manajemen pariwisata di Aceh Jaya. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh salah satu pegawai Disparekrafpora Aceh Jaya yang menyatakan bahwa:

⁵⁰ Wawancara dengan Pegawai Disparekrafpora Aceh Jaya Pada Tanggal 7 April 2023

“Faktor yang pertama dari segi anggaran, anggaran sudah kita siapkan untuk detinasi ini dan yang kami usulkan itu sebesar 10 Miliar dan dikarenakan persiapan Pora di tahun 2026 jadi anggaran kita lebih fokusnya ke persiapan Pora”⁵¹

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah berperan langsung dalam mendukung pariwisata di Aceh Jaya, pengarahan dari pemerintah cukup baik dengan adanya partisipasi dari berbagai kalangan, dilihat dari adanya anggaran yang dikhususkan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Aceh Jaya. Pemerintah mempunyai peran penting dalam menajalankan pariwisata di Aceh Jaya, dalam hal ini pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat untuk mendukung percepatan pembangunan agar terus banyak wisatawan yang berkunjung.

3. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian berarti menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan, penugasan orang-orang dalam kegiatan-kegiatan ini, dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai, dan menunjukan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan. Manajemen wisata yang dilakukan juga berhubungan dengan sumber daya manusia terkait manajemen yang dilakukan. Dalam hal ini pengembangan SDM dalam bentuk pembinaa diperlukan agar manajemen yang dilakukan dapat berjalan optimal. Hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu pegawai Disparekrafpora Aceh Jaya menyatakan bahwa:

⁵¹ Wawancara dengan Pegawai Disparekrafpora Aceh Jaya Pada Tanggal 7 April 2023

“Untuk pembinaan kami lebih melakukan pembinaan terhadap pokdarwis yang sudah kami buat ini untuk mengelola destinasi di daerah masing-masing, dan kami akan membina mereka dengan pengetahuan dasar terhadap wisata dan membantu mereka untuk bisa berbisnis dengan para swastawan agar bisa menjalin hubungan yang baik.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Disparekrafpora Aceh Jaya telah melakukan pembinaan kepada pihak-pihak pengelola wisata agar wisata di Aceh Jaya dapat berjalan dengan baik. Selain itu Disparekrafpora Aceh Jaya juga mengajak kelompok pemuda sekitar untuk diberi pelatihan pemahaman terkait kepariwisataan dan membangun kelompok sadar wisata. Seperti hal yang di ungkapkan oleh Kepala Disparekrafpora Aceh Jaya yang menyebutkan:

“Kita melakukan pembinaan terhadap pokdarwis (Kelompok Sadar wisata) di setiap destinasi ini kita lahirkan dulu kelompok-kelompok sadar wisata. Di 57 destinasi tadi kita meniniasi pemuda-pemuda setempat kita latih kita beri pengetahuan dasar terhadap kepariwisataan bagaimana menerima tamu, mengelola tamu,menajemen resiko, dan lain sebagainya SOP pariwisata inisiasi lahir nya pokdarwis tadi. Untuk 57 destinasi yang ada di Aceh Jaya sekarang sudah ada pokdarwis nya yaitu Kelompok sadar wisata”⁵³

Dalam pengorganisasian pariwisata Aceh Jaya diperlukan peran pemerintah khususnya Disparekrafpora Aceh Jaya dalam mengembangkan sumber daya manusia yang ada dengan baik dengan melakukan pengorganisasian terhadap sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia yang ada dalam lingkup internal yang bekerja di dinas pariwisata, maupun sumber daya manusia aparat Desa terkait, dan masyarakat Aceh Jaya.

⁵² Wawancara dengan Pegawai Disparekrafpora Aceh Jaya Pada Tanggal 7 April 2023

⁵³ Wawancara dengan Kepala Disparekrafpora Aceh Jaya Pada Tanggal 7 April 2023

4. Evaluating (Pengawasan)

Pengawasan merupakan usaha agar semua anggota kelompok suka melaksanakan tercapainya tujuan dengan kesadarannya dan berpedoman pada perencanaan dan usaha organisasinya. Pengawasan atau controlling terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan atau sebaliknya. Dalam melakukan pengawasan diperlukan penetapan standar atau ukuran, menciptakan perubahan dalam mencapai tujuan, dan mengevaluasi kerja. Pengawasan dilakukan dengan memantau seluruh aspek terkait kegiatan pariwisata di Aceh Jaya khususnya pihak pebisnis yang mendorong pembangunan pariwisata dan pendapatan daerah yaitu pokdarwis. Hasil wawancara dengan kepala Disparekrafpora Aceh Jaya menyebutkan bahwa:

“Pengawasan kita memantau semua yang diutamakan pokdarwis kita dorong untuk bisnis to bisnis artinya mereka kita dorong berbisnis, karena industri pariwisata ini identik dengan bisnis mendatangkan keuntungan bagi pengelola dan tujuan akhirnya adalah untuk kemakmuran ekonomi masyarakat.”⁵⁴

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Jaya telah dilakukan sebagaimana mestinya, Disparekrafpora Aceh Jaya melakukan pengawasan kepada kelompok masyarakat agar dapat mengetahui update selanjutnya apakah kelompok-kelompok pokdarwis tersebut yang telah dibantu dapat berkembang atau tidak. Sehingga diperlukan kerjasama lebih antara pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat agar dapat bersama-sama mengawasi dan mencapai pengembangan pariwisata yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

⁵⁴ Wawancara dengan Kepala Disparekrafpora Aceh Jaya Pada Tanggal 7 April 2023

4.2.2. Konsep Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Aceh Jaya

Pengelolaan oleh pemerintah dalam mengelola sektor pariwisata sebagai pendukung perekonomian masyarakat dan sebagai fasilitator dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adapun pengelolaan oleh pemerintah dalam mengelola sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Jaya yaitu:

a. Menciptakan lahan perekonomian masyarakat

Pengelolaan yang dilakukan pemerintah dalam mengelola pariwisata memberikan peluang kepada masyarakat untuk berusaha atau berwirausaha, jenis-jenis usaha yang ada kaitannya dengan pariwisata tergantung dari kreativitas para pengusaha swasta baik yang bermodal kecil maupun besar untuk memberikan jasa atau menawarkan produk yang sekiranya diperlukan oleh wisatawan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu menyiapkan lahan bagi masyarakat dalam hal ini masyarakat yang diprioritaskan hanya masyarakat asli yaitu penduduk asli setempat. Adanya pengelolaan wisata turut membuat peluang usaha bagi masyarakat. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu pelaku usaha wisata yang menyebutkan bahwa:

“Untuk sekarang Saya masih merencanakan membangun tempat usaha atau kedai di pantai tersebut dikarenakan belum ada satupun kedai di pantai tersebut. Akan tetapi pantainya bersih dan juga pemandangannya

sangatlah indah, jika ada kedai di pantai tersebut pasti pengunjung makin ramai karena sudah ada tempat untuk berteduh.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa dengan adanya potensi pengelolaan wisata setempat akan membuat masyarakat sekitar untuk mendorong perkenomian mereka dengan membangun tempat-tempat usaha makanan atau minuman bagi pengunjung. Perkembangan pariwisata merupakan sektor yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), disamping itu dapat menunjang perekonomian khususnya bagi masyarakat, dengan adanya pariwisata akan menumbuhkan usaha-usaha ekonomi yang saling merangkai kegiatan perekonomian sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Aceh Jaya. Adapun pengelolaan sektor pariwisata ini dapat membantu masyarakat khususnya para pelaku usaha dalam mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Hal ini berdasarkan wawancara dengan salah satu pelaku usaha bahwa:

“Sangat cukup bagi kami pelaku usaha yang melayani pengunjung yang datang ke pantai ini, di hari tertentu pantai ini penuh diramaikan oleh para pengunjung karena akan pantai dan laut yang sangat indah untuk di pandang”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan wisata oleh pemerintah dengan menyediakan lahan tempat usaha bagi pelaku usaha telah membantu mereka dalam mencukupi pendapatan mereka. Adanya pengelolaan wisata oleh pemerintah dapat mempengaruhi minat masyarakat berkunjung seperti adanya pemenuhan fasilitas wisatawan yang tersedia di tempat

⁵⁵ Wawancara dengan Pelaku Usaha di Pantai Ujong Baro Hill Pada Tanggal 10 April 2023

⁵⁶ Wawancara dengan Pelaku Usaha di Pantai Lhoek Geuleumpang Pada Tanggal 10 April 2023

wisata dapat membuat wisatawan ramai berkunjung di tempat tersebut tentu akan meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Sehingga apabila minimnya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan wisata ini akan membuat sedikit masyarakat atau pengunjung yang melirik wisata tersebut dan mengakibatkan minimnya wisatawan juga berdampak pada pendapatan pelaku usaha. Hal ini berdasarkan apa yang disebutkan oleh salah satu pelaku usaha dalam hasil wawancaranya bahwa:

“Untuk saat ini penghasilan yang saya dapatkan disini masih kurang dikarenakan tempatnya yang masuk kedalam dan juga jalan yang masih minim untuk pengunjung masuk dikarenakan pemerintah belum membangun jalan yang layak dan juga untuk fasilitas seperti mushala dan toilet belum tersedia, jadi membuat banyak pengunjung yang kecewa”⁵⁷

Hadirnya pariwisata memberi pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat dan mendapatkan manfaat secara langsung dalam kebijakan pemerintah menyiapkan lahan, perubahan ekonomi terlihat pada masyarakat terhadap kehadiran pariwisata menciptakan peluang yang ada untuk memenuhi kebutuhannya. Pengembangan yang dilakukan pihak pengelola ditujukan untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif masyarakat itu sendiri, dengan mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola wisata dan juga dalam berwirausaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka, secara tidak langsung yang dimana dapat meningkat melalui kinerja perekonomian dan perubahan sosial ekonomi masyarakat.

b. Penyedia sarana dan prasarana

⁵⁷ Wawancara dengan Pelaku Usaha di Pantai Ujong Pusong Pada Tanggal 10 April 2023

Adanya pengelolaan oleh pemerintah dalam mengelola pariwisata sangat diperlukan disamping menyediakan lahan usaha bagi pelaku usaha namun juga perlu adanya penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah sehingga pengelolaan yang dilakukan pemerintah sebagai fasilitator sangat dibutuhkan. Adapun sarana prasarana yang tersedia di telah memadai. Seperti yang disebutkan dalam hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha menyebutkan bahwa:

“Untuk pendapatan kalau dibanding dari dulu dengan yang sekarang saya jawab yang sekarang dikarenakan sekarang pemerintah sudah membantu dan membangun fasilitas seperti jalan, toilet dan tegu tulisan Pasi Luwah yang Membuat orang banyak yang datang dengan sudah bagus nya jalan.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan oleh pemerintah penting dalam membangun fasilitas wisata yang dibutuhkan khususnya jalan sehingga membuat banyak wisatawan yang akan berkunjung. Adanya penyediaan fasilitas oleh pemerintah dapat membantu pengelolaan wisata menjadi lebih baiknya fasilitas yang disediakan akan membuat kualitas wisata tersebut baik dan dapat meningkatkan pengunjung atau wisatawan.

Sebagai fasilitator pemerintah bergerak menjadi salah satu jembatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat lokal, sehingga mejadi bentuk kehidupan sosial ekonomi mereka. Tujuan pengelolaan wisata adalah untuk meningkatkan jumlah pengunjung wisatawan. Jumlah wisatawan yang berkunjung sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh salah satu pelaku usaha bahwa:

⁵⁸ Wawancara dengan Pelaku Usaha di Pantai Pasi Luwah Pada Tanggal 10 April 2023

“Pendapatan mencukupi karena wisata ini ramai dikunjungi pengunjung di hari-hari biasa pun akan tetapi di sore hari saja. Untuk di hari raya idul adha tempat wisata ini dipenuhi oleh pengunjung berbagai daerah karena ini wisata religi yang sejarahnya sudah sangatlah lama. Di hari raya idul adha biasanya pendapatan kami meningkat tinggi karena banyaknya pengunjung yang berdatangan dari pagi sampai malam pun masih ramai orang yang berbondong-bondong datang kesini.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana sangat di perlukan khususnya pada hari-hari besar yang ramai wisatawan berkunjung. Sebagai fasilitator, pemerintah harus memperhatikan beberapa hal dalam berwisata, tentunya adalah sarana dan prasarana pendukung wisata, pengunjung akan lebih nyaman dan lebih menikmati kegiatan berwisata apabila sarana dan prasarannya lengkap dan dapat digunakan dengan baik oleh pengunjung, untuk itu sarana dan prasarana dalam sebuah tempat pariwisata untuk pendukung wisata sangatlah penting. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai lebih memudahkan pihak pengelola untuk mengimplementasikan program yang sudah direncanakan. disamping itu sarana dan prasarana adalah salah satu faktor pendukung dari sistem pengelolaan.

⁵⁹ Wawancara dengan Pelaku Usaha di Poeteumeurhoem Daya Pada Tanggal 10 April 2023

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait Peran Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan, Dan Olahraga Aceh Jaya Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran pemerintah dalam pengelolaan memerlukan manajemen proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan yang dilakukan oleh Disparekrafpora Aceh Jaya lebih pada menetapkan 10 destinasi wisata unggulan yaitu : Situs Makam Poeteumerhoem, Gampong portugis/ Wisata argo gampong boeh giri, Sadar lestari/CRU sarah deu, Eko Wisata Mangrove, Kawasan Wisata Lhok Geuleumpang, Pantai Panorama, Pasie Luwah, Pantai Nissero, Ceuraceu eumbon, Pantai Lueng Gayo dan melakukan promosi kepadanya. Pengorganisasian dengan melakukan pembinaan kepada pihak-pihak pengelola wisata agar wisata di Aceh Jaya dapat berjalan dengan baik. Selain itu Disparekrafpora Aceh Jaya juga mengajak kelompok pemuda sekitar untuk diberi pelatihan pemahaman terkait kepariwisataan dan membangun kelompok sadar wisata. Penggerakan pengelolaan wisata, yaitu mengupayakan adanya dukungan partisipasi dari semua pihak yang terlibat memberikan motivasi, dan mengembangkan potensi secara optimal

dan hal penghambat dalam mencapai tujuannya. Melakukan pengawasan kepada kelompok masyarakat agar dapat mengetahui update selanjutnya apakah kelompok-kelompok pokdarwis tersebut yang telah terbantu dan dapat berkembang atau tidak.

2. Konsep pengelolaan oleh pemerintah dalam mengelola pariwisata di Aceh Jaya dengan membantu menumbuhkan usaha-usaha ekonomi yang saling merangkai kegiatan perekonomian sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Aceh Jaya. Konsep pengelolaan wisata oleh pemerintah dengan menyediakan lahan tempat usaha bagi pelaku usaha telah membantu mereka dalam mencukupi pendapatan mereka. Pemerintah dalam hal sarana dan prasarana yaitu mengelola penyediaan fasilitas oleh pemerintah dapat membantu wisata menjadi lebih baiknya fasilitas yang disediakan akan membuat kualitas wisata tersebut baik dan dapat meningkatkan pengunjung atau wisatawan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Disparekrafpora Aceh Jaya agar dapat terus dapat melakukan pengelolaan pariwisata di Aceh Jaya sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Bagi masyarakat terikati untuk bersama-sama dapat menjaga dan membantu melakukan pengelolaan pariwisata di Aceh jaya seperti

membuka peluang usaha dan membantu mempromosikan pariwisata agar dapat lebih dikenal calon wisatawan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ananto Widodo, Hesti Lestari, *Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Semarang*, Jurnal of Public Policy and Manajemen, 2016.
- Ayu Karlina, *Strategi Pengembangan Potensi Wisata Alam di Kabupaten Aceh Jaya*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Aceh Jaya dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik Aceh Jaya.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kenacana, 2015.
- Dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022.
- George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, Principles of Management), Terj. G.A. Ticoalu, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Kartini La Ode Unga, I Made Benyamin, dkk, *Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Kepulauan Banda*, 2011.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Noorsyamsa Djumara, *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Putra, 2016.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan tentang Pembimbing Skripsi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 569/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munagasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan FMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan FMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04-2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **01 Februari 2023**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :

1. Dr. Fauzi, M.St. Sebagai pembimbing I
2. Muazminah, B.Sc., MPA. Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :

Nama : Yusrijal
 NIM : 160802059
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Peran Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 01 Maret 2023
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,


M. MULI MULI

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-0832/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/04/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya
2. Pelaku Usaha UMKM Kabupaten Aceh Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **YUSRIJAL / 160802059**

Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Desa Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee , Kabupaten Aceh Jaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan, dan Olahraga Aceh Jaya Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

بندة الرانيرى

Banda Aceh, 06 April 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 05 Oktober 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 3 Surat Keterangan telah melakukan Penelitian dari Kepala Desa Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan Pinto Sa Dalam, No : 69, Kuala Meurisi – Calang, Telepon / FAX : (0654) 2215918,
Kode Pos : 23654
<http://disparekrafpora.acehjayakab.go.id> dan Email : disporapar.acehjaya@gmail.com
C A L A N G

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 500.5.7.15/6/2023

1. Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya, menerangkan sesungguhnya saudara :

Nama : **YUSRIJAL**
NIM : 160802059
Alamat Sekarang : Gampong Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.

Mahasiswa tersebut benar telah melakukan kegiatan Penelitian dari Tanggal 10 April 2023 s.d 02 Juli 2023 dengan judul :

" Peran Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Aceh Jaya Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata "

2. Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Calang, 5 Juli 2023

Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya



JUANDA, S. Pd. I., M. Pd
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 197806162003121006

Tembusan :

1. Bupati Aceh Jaya, di Calang;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
3. Bappeda Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
4. BKPSDM Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
5. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Top Ten di Calang
6. Arsip.

Lampiran 4 Hasil Wawancara

No	Indikator	Pertanyaan	Informan	Jawaban
1	a. Perencanaan (<i>Planning</i>)	1. Bagaimana konsep pengembangan dan pengelolaan objek wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Aceh Jaya?	Kepala Disparekrafpora Aceh Jaya JUANDA, S.Pd.I., M.Pd	1 Untuk perencanaan mengacu kepada destinasi wisata yang ada di Aceh Jaya. Destinasi yang ada di Aceh Jaya ada 57, untuk mengelola 57 destinasi tidak mungkin sekaligus kita bangun dengan kemampuan atau anggaran daerah yang sangat minim. Maka perencanaan kita untuk sekarang kita buat dulu topten, kita pilih dulu mana yang menjadi destinasi unggulan . Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah memilih dulu 10 destinasi unggulan setelah itu kita bangun sarana atau fasilitas yang dibutuhkan seperti toilet, mushala, jalan dan lain-lain. Maka program kita adalah untuk mempromosikan 10 destinasi unggulan yang sudah kita pilih dan langkah disparekrafpora beserta pemerintahan Aceh Jaya ialah untuk memfasilitasi terlebih dahulu 10 destinasi unggulan yang ada di Aceh Jaya.

	<p>b. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)</p>	<p>2. Pembinaan apa saja yang dilakukan kepada pihak pengelola wisata?</p>	<p>2 kita melakukan pembinaan terhadap pokdarwis (Kelompok Sadar wisata) di setiap destinasi ini kita lahirkan dulu kelompok-kelompok sadar wisata. Di 57 destinasi tadi kita meniniasi pemuda-pemuda setempat kita latih kita beri pengetahuan dasar terhadap kepariwisataan bagaimana menerima tamu, mengelola tamu,menanajemen resiko, dan lain sebagainya SOP pariwisata inisiasi lahir nya pokdarwis tadi. Untuk 57 destinasi yang ada di Aceh Jaya sekarang sudah ada pokdarwis nya yaitu Kelompok sadar wisata.</p>
	<p>c. Penggerakan (<i>Actuating</i>)</p>	<p>3. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan destinasi wisata?</p>	<p>3 Faktor pendukung yang pertama yaitu kondisi alam kita punya wisata alam, wisata buatan, wisata religi. Kita udah sangat bagus untuk 57 destinasi ini sangat bagus untuk Aceh Jaya.</p> <p>Untuk lautnya kita punya bnyak terumbu karang yang indah, kita punya observasi penyu, observasi hiu, untuk observasi hiu yang hanya satu-satunya di asia tenggara</p>

			<p>hiu itu datang ke kita untuk bereproduksi setelah itu dia akan kembali lagi ke laut.</p> <p>Untuk sekarang kita di dukung oleh komunitas-komunitas wisata seperti POJA, komonitas Tours, Pemandu, HPI, Gempi dan lain-lain sebagainya.</p> <p>Kelemahan kita untuk sekarang dari segi dana, mengapa kita tidak bisa membangun 57 destinasi tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran, Pemerintah banyak mengelola berbagai sektor walaupun sektor wisata adalah unggulan bagi Aceh Jaya, akan tetapi pemerintah lebih mementingkan sektor yang mendasar seperti pendidikan, kesehatan, PUPR itu yang harus di penuhi maka keterbatasan danalah yang menyebabkan kita agak terhambat untuk tahun ini kita hanya mampu membangun 10 destinasi saja .</p>
	<p>d. Pengawasan (Controlling)</p>	<p>4. Apa saja bentuk evaluasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata sebagai pengelolaan wisata di Aceh Jaya?</p>	<p>4 pengawasan kita memantau semua yang diutamakan pokdarwis kita dorong untuk bisnis to bisnis artinya mereka kita dorong berbisnis, karena industri pariwisata ini identik dengan bisnis mendatangkan keuntungan bagi pengelola dan tujuan akhirnya adalah unuk kemakmuran eknomi masyarakat.</p> <p>Maka kelompok-kelompok tadi kita evaluasi mana yang berkelanjutan artinya jika kita sudah bantu tahun ini apakah tahun depan dia akan</p>

				berkembang atau tidak ini kita pantau terus sampai sekarang.
--	--	--	--	--

No	Indikator	Pertanyaan	Informan	Jawaban
1	a. Perencanaan (Planning)	1. Bagaimana konsep pengembangan dan pengelolaan objek wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Aceh Jaya?	Pegawai Disparekrafpora Aceh Jaya ISMAIL, S.Pd (Sekretaris Dinas)	1. kita lihat perkembangan di lapangan mana yang menjadi unggulan bagi Aceh Jaya, Untuk saat ini perencanaan kami terhadap wisata adalah melahirkan pokdawis (kelompok sadar wisata) yang dimana kelompok inilah yang mengelola destinasi yang ada di aceh jaya di bawah kendali kami dari dians maupun pemerintah.
	b. Pengorganisasian (Organizing)	2. Pembinaan apa saja yang dilakukan kepada pihak pengelola wisata?		2 untuk pembinaan kami lebih melakukan pembinaan terhadap pokdarwis yang sudah kami buat ini untuk mengelola destinasi di daerah masing-masing, dan kami akan membina mereka dengan pengetahuan dasar terhadap wisata dan membantu mereka untuk bisa berbisnis dengan para swastawan agar bisa menjalin hubungan yang baik.

	c. Penggerakan (Actuating)	3. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan destinasi wisata?	<p>3 Faktor pendukung banyak kalau dinas dan juga pemerintah tidak tutup mata kalau tempat wisata itu berjalan dengan bagus sesuai dengan syariah kami akan dukung dan juga untuk setiap kegiatan-kegiatan wisata baik di akhir tahun, rabu abeh, kita akan dibantu dari pemerintah kabupaten kalau dari pemantauan ada WH dan kepolisian yang bahwa lokasi itu kita dukung.</p> <p>Kalau hambatan biasanya dari internal sendiri kurangnya pengawasan, memang kita melakukan wisata syariah ini jadi hambatannya kurangnya pengawasan. maka dari itu disini kita memiliki peran bersama dalam menjaga nama baik lokasi wisata beserta nama baik kabupaten.</p>
	d. Pengawasan (Controlling)	4. Apa saja bentuk evaluasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata sebagai pengelolaan wisata di Aceh Jaya?	4 kalau evaluasi kita dengan pj. Bupati yang sekarang sangat antusias dengan wisata, beliau memerintahkan kami untuk mengecek tempat wisata itu apakah sudah ada organisasi tidak seperti pokdarwis, rata-rata semuanya sudah ada untuk saat ini jadi jika ada yang masih tidak berjalan maka kami akan memanggil yang bersangkutan tersebut untuk kita bina apa kendalanya.

No	Indikator	Pertanyaan	Informan	Jawaban
1	a. Perencanaan (Planning)	1. Bagaimana konsep pengembangan dan pengelolaan objek wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Aceh Jaya?	Pegawai Disparekrafpo ra Aceh Jaya MUNADI YASALEM, S.Pd.I (Kabid Pariwisata)	1 mengenai pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata di Aceh Jaya itu sesuai dengan temu ramah dengan pokdarwis juga melibatkan kepala dinas , Bupati, Sekda itu di Aceh Jaya fokuskan di 10 destinasi wisata Aceh Jaya di sekaligus dengan pengembangannya salah satunya di Poeteumerhoem dan kampung portugis di Kuala Daya, habis itu di ie jerneh di CRU sarah deu, ekowisa Manggrove , Pasi Luwah, Pantai Lhoekgeuleumpang, ceraceueumbon, Ihoeng gayo dan di Pantai Panorama. Itu yang kita targetkan untuk pengembangannya sesuai dengan anggaran yang ada di Kabupaten Aceh Jaya.
	b. Pengorganisasian (Organizing)	2. Pembinaan apa saja yang dilakukan kepada pihak pengelola wisata?		2 Kalau pembinaan itu fokusnya lebih pengembangan SDM itu lebih fokusnya ke Ekonomi Kreatif, kalau kita Cuma paling tukar pendapat saja.
	c. Penggerakan (Actuating)	3. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan destinasi wisata?		3 Faktor yang pertama dari segi anggaran, anggaran sudah kita siapkan untuk destinasi ini dan yang kami usulkan itu sebesar 10 Miliar dan dikarenakan persiapan Pora di tahun 2026 jadi anggaran kita lebih fokusnya ke persiapan Pora. Untuk kita pariwisata

			mengenai pengembangan masih wacana itu sebesar 1 miliar dari target 10 miliar turun menjadi 1 Miliar apa itu tercapai atau tidak tercapai nanti kita liat.
	d. Pengawasan (Controlling)	4. Apa saja bentuk evaluasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata sebagai pengelolaan wisata di Aceh Jaya?	4 Evaluasi terhadap destinasi-destinasi wisata itu selalu kita evaluasi itu mengenai pengembangan didestinas. Tapi kalau fokusnya dari dinas itu tidak bakalan maju tapi kalau adanya inisiatif dari pokdarwis itu insya Allah pasti akan berkembang.

No	Indikator	Pertanyaan	Informan	Jawaban
1.	a. Perencanaan (<i>Planning</i>)	1. Bagaimana rencana meningkatkan potensi usaha/jasa anda melalui peran wisata ini?	Pelaku Usaha Pendukung Para Sektor Pariwisata Cut Afrianti 40 tahun Pelaku Usaha di Pantai Pasi Luwah	1 Untuk meningkatkan potensi usaha kami hanya akan melakukan pembenahan tempat usaha kami dengan outfit yang bagus atau fleksibel agar pengunjung yang datang akan balik lagi dikarenakan keindahan atau keberhisnan tempat kami. Dan lagi kami akan mempromosikan usaha kami dan wisata ini agar diketahui oleh orang-orang dengan berbagai ragam caranya seperti vidio, foto dan juga foto-foto makanan dan juga pemandangan yang indah dan bagus.
	b. Pengorganisasi an (<i>Organizing</i>)	2. Apakah sumber pendapatan ini telah mencukupi?		2 Kalau dibilang cukup ya kita tidak cukup dikarenakan tempat ini ramainya hanya di sore hari dan malam untuk di hari besar atau hari libur baru banyak yang datang sehingga penghasilan

				meningkat banyak seperti itu saja.
	c. Penggerakan (<i>Actuating</i>)	3. Kapan anda memulai usaha atau jasa anda setiap harinya?		3 Untuk tempat usaha kami buka dari pagi jam 08.00 dikarenakan harus persiapan bersih-bersih, untuk siangnya pengunjung sudah ada yang datang untuk minum-minum atau duduk-duduk di sini. Dan untuk jam tutupnya paling telat jam 10 malam karena di Aceh Jaya khususnya di Calang jam segitu para pengunjung sudah tidak banyak lagi.
	d. Pengawasan (<i>Controlling</i>)	4. Bagaimana perbandingan pendapatan yang dulu dan sekarang?		4 Untuk pendapatan kalau dibanding dari dulu dengan yang sekarang saya jawab yang sekarang dikarenakan sekarang pemerintah sudah membantu dan membangun fasilitas seperti jalan, toilet dan tegu tulisan Pasi Luwah yang Membuat orang banyak yang datang dengan sudah bagusnya jalan.

No	Indikator	Pertanyaan	Informan	Jawaban
1.	a. Perencanaan (<i>Planning</i>)	1. Bagaimana rencana meningkatkan potensi usaha/jasa anda melalui peran wisata ini?	Pelaku Usaha Pendukung Para Sektor Pariwisata Rival Fahrozi 21 Tahun Pelaku Usaha di Pantai Ujong Pusong	1 Untuk rencana peningkatan potensi usaha saya melakukan promosi di sosial media agar pengunjung tau akan keindahan pantai-pantai yang ada di Aceh Jaya khususnya di Pantai Ujong Pusong ini. Jadi dengan adanya sosial media maka kedepannya tempat ini akan ramai dan juga akan dilirik oleh pemerintah setempat untuk dibenahi dan di awasi.

	b. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	2. Apakah sumber pendapatan ini telah mencukupi?	2 Untuk saat ini penghasilan yang saya dapatkan disini masih kurang dikarenakan tempatnya yang masuk kedalam dan juga jalan yang masih minim untuk pengunjung masuk dikarenakan pemerintah belum membangun jalan yang layak dan juga untuk fasilitas seperti mushala dan toilet belum tersedia, jadi membuat banyak pengunjung yang kecewa.
	c. Penggerakan (<i>Actuating</i>)	3. Kapan anda memulai usaha atau jasa anda setiap harinya?	3 Saya memulai usaha ini di tahun 2020 silam dikarenakan dulu saya liat ramai yang kesini jadi saya bangun usaha disini sekaligus saya membuat tempat ini lebih bersih dan juga nyaman. Untuk jam buka nya kalau hari biasa saya buka siang dan tutup jam 18.00 , kalau hari besar seperti meugang atau hari raya saya buka pagi karena banyak pengunjung yang datang.
	d. Pengawasan (<i>Controlling</i>)	4. Bagaimana perbandingan pendapatan yang dulu dan sekarang?	4 kalau pendapatan yang dulu sama sekarang sama saja dikarenakan belum adanya turut serta pemerintah dari tempat ini ramai dikunjungi pengunjung. Kalau saja pemerintah membangun toilet layak pakai dan juga mushala insya allah kedepannya akan lebih berkembang dan juga pendapatan akan meningkat pesat.

No	Indikator	Pertanyaan	Informan	Jawaban
2.	a. Perencanaan (<i>Planning</i>)	1. Bagaimana rencana meningkatkan potensi usaha/jasa anda melalui peran wisata ini?	Pelaku Usaha Pendukung Para Sektor Pariwisata Sanawiyah 35 Tahun Pemandu Wisata/ Pelaku Usaha di Pantai Ujong Baro Hill	1. Untuk sekarang Saya masih merencanakan membangun tempat usaha atau kedai di pantai tersebut dikarenakan belum ada satupun kedai di pantai tersebut. Akan tetapi pantainya bersih dan juga pemandangannya sangatlah indah, jika ada kedai di pantai tersebut pasti pengunjung makin ramai karena sudah ada tempat untuk berteduh.
	b. Pengorganisasian (<i>Organising</i>)	2. Apakah sumber pendapatan ini telah mencukupi?		2. Untuk pendapatan belum kan masih belum dibangun tempat usahanya tapi masih dalam rencana yang akan datang. Untuk prediksinya insya allah akan mendapat untung banyak karena pantai dan pemandangan yang indah dan bagus pasti akan menarik pengunjung.
	c. Penggerakan (<i>Actuating</i>)	3. Kapan anda memulai usaha atau jasa anda setiap harinya?		3. Insya Allah kalau tidak halangan lain saya akan buka dalam tahun ini. Untuk jam bukanya akan saya buka

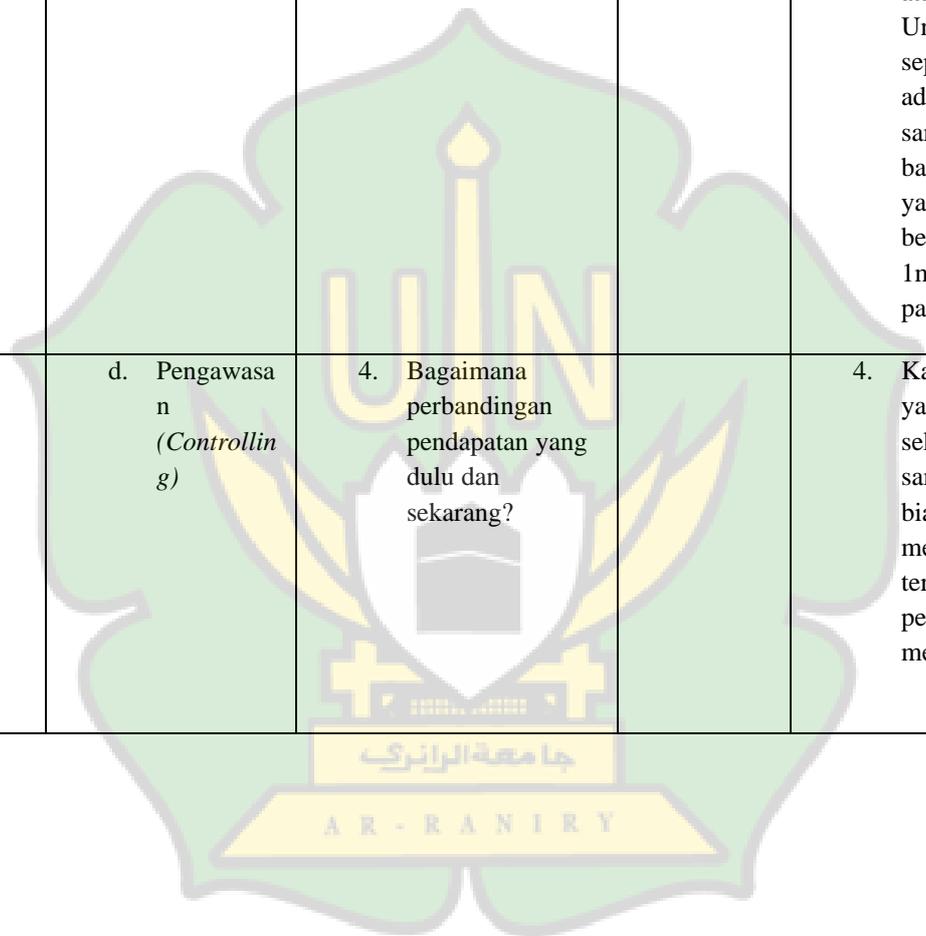
				siang sampai sore saja dulu jika nanti pengunjungnya banyak akan saya ubah lagi jam buka dan tutupnya.
	d. Pengawasan (<i>Controlling</i>)	4. Bagaimana perbandingan pendapatan yang dulu dan sekarang?		4. Untuk Pendapatan saya belum bisa jamin tetapi nanti setelah kedai usaha saya terbangun baru bisa kita liat apakah akan tercapai dan berkembang nanti kita liat.

No	Indikator	Pertanyaan	Informan	Jawaban
1.	a. Perencanaan (<i>Planning</i>)	1. Bagaimana rencana meningkatkan potensi usaha/jasa anda melalui peran wisata ini?	Pelaku Usaha Pendukung Para Sektor Pariwisata Nadia 22 Tahun Pelaku Usaha di Pantai Lhoek Geuleumpang	1. Untuk meningkatkan potensi usaha kalau kami di pantai lhoek geuleumpang sudah ramai yang tau tentang pantai ini. Banyak pengunjung datang pada hari-hari besar seperti hari raya dan rabu abeh untuk berkreasi di pantai, dikarenakan pemerintah sudah menyediakan dan membangun mushala dan toilet yang layak pakai dan dijalan lintas barat selatan ada mesjid yang bagus.
	a. Pengorganisasian (<i>Organising</i>)	2. Apakah sumber pendapatan ini telah mencukupi?		2. Sangat cukup bagi kami pelaku usaha yang melayani pengunjung yang datang ke pantai

				ini, di hari tertentu pantai ini penuh diramaikan oleh para pengunjung karena akan pantai dan laut yang sangat indah untuk di pandang.
	b. Penggerakan (<i>actuating</i>)	3. Kapan anda memulai usaha atau jasa anda setiap harinya?		3. Saya memulai usaha ini sudah lama karena turun temurun dari keluarga, dan sekarang yang mengelolanya adalah saya. Untuk jam bukanya di hari libur saya buka pagi dan tutup disore hari, untuk dihari biasa saya buka di jam 10 sampai sore hari tergantung dengan masih ada pengunjung atau tidak.
	c. Pengawasan (<i>Controlling</i>)	4. Bagaimana perbandingan pendapatan yang dulu dan sekarang?		4. Perbandingan dulu dengan sekarang , dulu sebelum saya yang mengelola dikelola oleh orang tua saya pendapatannya stabil sampai dengan yang dikelola saya masih stabil sampai sekarang, tergantung banyak tidaknya pengunjung yang datang.

No	Indikator	Pertanyaan	Informan	Jawaban
1.	a. Perencanaan (<i>Planning</i>)	1. Bagaimana rencana meningkatkan potensi usaha/jasa anda melalui peran wisata ini?	Pelaku Usaha Pendukung Para Sektor Pariwisata Suriana 25 Tahun Pelaku Usaha di Poeteumeurh oem Daya	1. Peran wisata di poeteumerhoem daya sangatlah tinggi dikarenakan wisata ini termasuk wisata religi dan juga wisata pantainya yang indah. Untuk rencanan meningkatkan potensi wisata ini pemerintah dan kami selaku pelaku usaha disini melakukan berbagai hal seperti temu ramah dan juga saling tukar pendapat utuk kemajuan wisata ini lebih maju kedepannya.
	b. Pengorganisasian (<i>Organising</i>)	2. Apakah sumber pendapatan ini telah mencukupi?		2. Mencukupi karena wisata ini ramai dikunjungi pengunjung di hari-hari biasa pun akan tetapi di sore hari saja. Untuk di hari raya idul adha tempat wisata ini dipenuhi oleh pengunjung berbagai daerah karena ini wisata religi yang sejarahnya sudah sangatlah lama. Di hari raya idul adha biasanya pendapatan kami meningkat tinggi karena banyaknya pengunjung yang berdatangan dari pagi sampai malam pun masih ramai orang yang berbondong-bondong datang kesini.
	c. Penggerakan	3. Kapan anda memulai usaha		3. Usaha ini sudah lama saya mulai dari 2016

	<i>(Actuating)</i>	atau jasa anda setiap harinya?		<p>lalu dan masih berjalan sampai sekarang.</p> <p>Untuk jam bukanya saya buka di hari biasa jam 2 karena pengunjung jika hari biasa banyak yang datang disore hari dan saya tutup jam 18.00 atau mau magrib.</p> <p>Untuk di hari khusus seperti hari raya idul adha saya buka pagi sampai malam karena banyaknya pengunjung yang datang itu bisa berlanjut sampai 1 minggu tempat ini di padati oleh pengunjung.</p>
	d. Pengawasan <i>(Controlling)</i>	4. Bagaimana perbandingan pendapatan yang dulu dan sekarang?		4. Kalau dibandingkan yang dulu dengan sekarang sih masih sama yaitu di hari biasa pendapatannya mencukupi dan dihari terkhusus itu pendapatan kami melesat pesat.



Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara

1. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Aceh Jaya

JUANDA, S.Pd.I., M.Pd



2. Sekretaris Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Aceh Jaya

ISMAIL, S.Pd



3. Kepala Bagian Pariwisata Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif,
Kepemudaan dan Olahraga Aceh Jaya

MUNADI YASALEM, S.Pd.I



4. Pelaku Usaha di Pantai Pasi Luwah

Cut Afrianti



5. Pelaku Usaha di Pantai Ujong Pusong

Rival Fahrozi



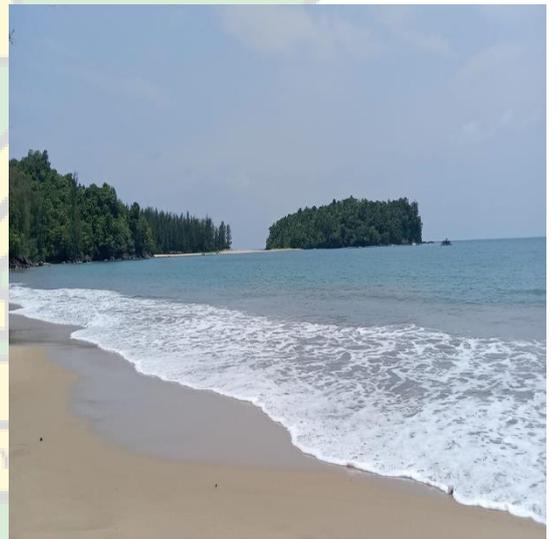
6. Pelaku Usaha di Pantai Ujong Baro Hill

Sanawiyah



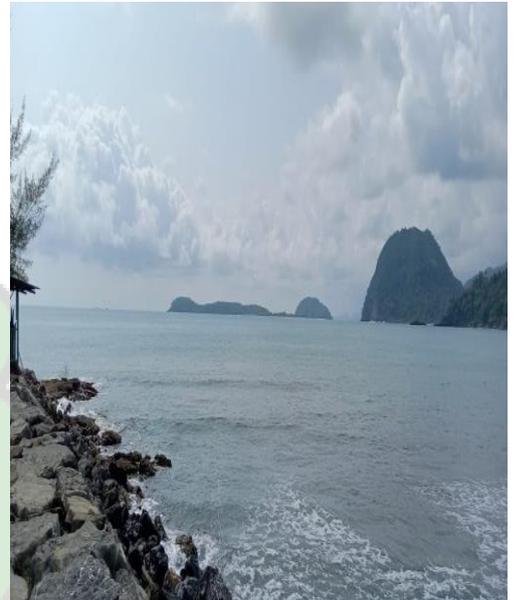
7. Pelaku Usaha di Pantai Lhoek Geuleumpang

Nadia



8. Pelaku Usaha di Poeteumeurhoem Daya

Suriana



9. Sadar Lestari/CRU Sarah Deu



10. Gampong Portugis Lamno



Sumber : AcehTribunNews.Com



Sumber : www.beritasatu.com

11. Eko Wisata Mangrove



12. Pantai Panorama



13. Pantai Nissero



Sumber : TheacehPost



14. Air Terjun Ceuraceu Eumbon



15. Pantai Lueng Gayo



Sumber : Theacehpost

